

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perusahaan memainkan peranan penting dalam kehidupan, karena menjalankan fungsi – fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Perusahaan juga memiliki peranan penting karena terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Peranan ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya yang bersifat ekonomis sangat terbatas dan oleh karenanya harus dapat dialokasikan seoptimal mungkin.

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu rerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, *shareholders* dan *stakeholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Pada kondisi perekonomian seperti yang terjadi pada saat ini, pengelolaan perusahaan telah dianggap penting sebagaimana telah diterapkan pada pemerintah suatu negara. Pernyataan diatas telah menegaskan kedudukan penting perusahaan – perusahaan dalam menjalankan peran mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Secara luas pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi antara hukum, peraturan pendaftaran dan praktek pribadi yang memungkinkan perusahaan tersebut menarik modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan

sekaligus kewajiban hukum. Istilah “pengelolaan perusahaan” berkaitan dengan hubungan antara pengelola, direktur, dan pemegang saham dari perusahaan. Istilah tersebut juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat.

Suatu survei pada tahun 1999 oleh Pricewaterhouse Coopers terhadap investor – investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar – standar akuntansi dan penataan, pertanggung jawaban terhadap para pemegang saham, standar – standar pengungkapan dan transparansi serta proses – proses kepengurusan perusahaan. Di Indonesia, kepemilikan perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham sangat terpusat, dan persentase manajer yang termasuk dalam grup pengendali juga sangat tinggi. Perhatian terhadap standar – standar *corporate governance* yang disepakati ditingkat internasional merupakan keharusan bagi perusahaan Indonesia.

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Suatu sistem *corporate governance* yang efektif seharusnya mampu mengatur kewenangan direksi, yang bertujuan dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. *Corporate governance* memusatkan perhatian pada isu fundamental yang akan berguna

untuk menilai kinerja direksi berdasarkan kepentingan berdasarkan kepentingan pemegang saham.

*Corporate governance* yang tidak efektif merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia. Menurut Hiro Tugiman perusahaan publik di bursa saham merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menjadi teladan dalam menerapkan *corporate governance* yang efektif. Perusahaan publik memberikan sumbangan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian serta menghindari krisis ekonomi dan kegagalan dimasa depan.

*Corporate governance* didefinisikan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Messier et al. (2005:514), definisi audit intern adalah:

"audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan kondisi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dan tujuan organisasi. Audit ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin ilmu untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola."

Berdasarkan pengertian diatas nampak bahwa pelaksanaan audit intern sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan pengendalian intern yang merupakan bagian dari suatu perusahaan terutama BUMN.

Penerapan GCG telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan atas dasar hal tersebut sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan kewajiban untuk menerapkan *corporate governance* dilingkungan BUMN.

Penelitian ini akan mencoba meneliti apakah pelaksanaan audit intern yang diterapkan dapat memotivasi manajemen untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan yaitu **P.T. XYZ**

Bila pelaksanaan audit intern dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* berarti ada dukungan dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mewujudkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui sejauh mana hubungan pelaksanaan audit intern dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada **P.T. XYZ**. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul:

**“Peranan Audit Intern Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Yang Efektif”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah adalah:

1. Apakah audit intern yang dilaksanakan untuk penerapan *Good Corporate Governance* telah berjalan secara efektif ?

2. Apakah audit intern telah berperan secara memadai dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan *Good Corporate Governance* telah berjalan efektif.
2. Untuk mengetahui apakah audit intern yang memadai dapat membantu perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* yang efektif.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta sudut pandang penulis mengenai pelaksanaan audit intern dengan perwujudan *Good Corporate Governance*, dan memperoleh gambaran secara langsung sampai sejauh mana kesesuaian antara teori dengan praktek sesungguhnya pada PT XYZ
2. Bagi Perusahaan, diharapkan pengumpulan dan pengelolaan data penelitian ini menjadi informasi yang berguna sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan audit intern dan perwujudan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi untuk memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good*

*Corporate Governance*, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.5 Rerangka Pemikiran**

Di Indonesia, isu *corporate governance* muncul setelah krisis tahun 1997 yang mengakibatkan operasi perusahaan tersendat, nilai hutang swasta dan pemerintah membengkak dan investor asing maupun perusahaan asing enggan masuk ke Indonesia, dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Penyebab terbesar kebangkrutan tersebut adalah pengelolaan perusahaan yang buruk.

Krisis yang melanda Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh lemahnya penerapan *good corporate governance*. Minimnya perlindungan pemegang saham minoritas menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, terutama investor asing untuk tetap memegang saham – saham perusahaan publik di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi suatu perusahaan dalam mengelola sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasi, pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik berkepentingan yang sangat menyimpang dari norma – norma tata kelola perusahaan yang baik.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor *corporate* menerapkan *good governance* adalah memperbaiki keterbukaan informasi dan dalam jangka panjang memperbaiki perangkat hukum. Kondisi ini masih sangat sulit diterapkan di

Indonesia mengingat banyaknya praktik kecurangan dan praktik bisnis yang melanggar kaidah *good corporate governance*.

*Corporate governance* adalah salah satu aspek perhitungan yang cukup signifikan saat ini. Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai dengan perkembangan dari teknologi dan dunia informasi membuat batasan dari tembok pemisah negara – negara semakin tipis. *Corporate governance* bermula dari konsep akuntabilitas atas asset dan sumber – sumber yang dipercayakan kepada manajemen. Pada saat perusahaan masih nol, para karyawan dengan mudah mempertanggungjawabkan tindakan kepada atasan atau pemilik perusahaan. Dalam keadaan seperti ini akuntabilitas relative mudah dikelola, dimana jalur komunikasi biasanya pendek dan langsung. Semakin besar perusahaan, pemilik dan manajemen mempunyai jarak yang jauh, dan dewan komisaris merupakan mediator (intuisi) yang menjembatani kedua belah pihak tersebut. Disinilah isu akuntabilitas menjadi sangat penting. Dalam konteks ini dewan komisaris merupakan jembatan penghubung antara pemegang saham atau pemilik dengan eksekutif, manajer dan karyawan lain dalam organisasi.

Pada KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian *Good Corporate Governance* yaitu :

“*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.”

Tujuan dari *corporate governance* adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”. Secara lebih rinci, terminologi *corporate governance* dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, 1998), ada empat unsur penting dalam *Corporate Governance*, yaitu:

- ***Fairness*** (Keadilan). Menjamin perlindungan hak – hak para pemegang saham, termasuk hak – hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- ***Transparency*** (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kepemilikan perusahaan.
- ***Accountability*** (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).
- ***Responsibility*** (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai – nilai sosial.

Jadi dapat disimpulkan prinsip – prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal – hal sebagai berikut:

1. Hak – para pemegang saham,
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham,
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam *corporate governance*,
4. Transparansi dan penjelasan,
5. Peranan dewan komisaris.

Berikut ini merupakan contoh kasus dalam P.T. Astra Internasional.

Sebelum tahun 1992 keluarga Soeryadjaya adalah pemegang saham mayoritas P.T. Astra Internasional. Perusahaan ini menerapkan *corporate governance* dengan baik walaupun kepemilikan saham mayoritas terpusat ditangan satu keluarga saja. Sejak tahun 1984 P.T. Astra telah memperkenalkan budaya perusahaan berdasarkan Catur Dharma (Empat Sikap). Catur Dharma terdiri dari:

1. Menjadi milik yang bermanfaat bagi Bangsa dan Negara,
2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan,
3. Saling menghargai dan membina kerja sama, dan
4. Berusaha mencapai yang terbaik.

Catur Dharma ini ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan memperkenalkan Pedoman Etika Bisnis Astra pada tahun 1985. Pada tahun 1999 P.T. Astra menyusun Aspek Korporasi untuk melaksanakan *corporate governance*

yang baik yang harus ditaati oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Ada empat unsur yang tercakup dalam *corporate governance* yang ada di P.T. Astra, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada tahun 1990, P.T. Astra terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan indeks BEJ pada tingkat paling tinggi mencapai Rp. 33.000,00 per saham dengan harga IPO (emisi perdana) Rp. 14.850,00. Pada tahun itu pula, P.T. Astra meraih penghargaan Piagam Manajemen “Manajemen Pengoperasian” dari Asian Institute of Management. Hingga tanggal 30 April 2000, pemegang saham mayoritas P.T. Astra adalah Cycle & Carriage (Mauritius) Ltd. (CCL), dengan total saham 24,14%

Salah satu contoh bahwa *corporate governance* dilaksanakan adalah adanya pengendalian manajemen P.T. Astra baik ditingkat komisaris maupun direksi. Dimana yang menjabat sebagai dewan komisaris maupun dewan direksi mayoritas adalah tenaga – tenaga profesional yang independen yang pada dasarnya sudah terjadi sebelum maupun sesudah tahun 1992. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dalam Code For Good *Corporate Governance* yang menganjurkan paling sedikit 20% dari anggota dewan komisaris maupun dewan direksi adalah anggota independen.

P.T. Astra menyadari pentingnya dilaksanakan *good corporate governance* (GCG), dimana dewan komisaris maupun dewan direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan GCG dengan dibantu oleh semua divisi P.T. Astra. Disamping itu terdapat Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai

lembaga pendukung untuk memastikan bahwa *corporate governance* telah dilaksanakan dengan baik dilingkungan P.T. Astra.

Terbukti dengan dilaksanakannya *corporate governance* yang baik di P.T. Astra, perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang sekalipun ada krisis politik dan ekonomi membuat pendapatan konsolidasi perusahaan turun, tapi tidak menjatuhkan perusahaan. Oleh karena penerapan *good corporate governance* maka P.T. Astra Internasional masih tetap menjadi yang terdepan.

Yeh, Lee, dan Woitdke (2001:48) melaporkan perusahaan keluarga yang memiliki tingkat kontrol tinggi akan memiliki kualitas kinerja keuangan yang rendah, dibandingkan perusahaan keluarga yang memiliki tingkat kontrol yang rendah dan telah dimiliki secara luas oleh publik. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa nilai perusahaan lebih tinggi ketika pengendali perusahaan menempatkan wakilnya dalam jajaran manajemen dan jumlahnya hanya minoritas saja. Pengendali perusahaan disini maksudnya adalah adanya auditor intern yang bersifat independen.

Satu keuntungan dengan hadirnya audit intern adalah kemampuannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen, auditor intern memungkinkan manajemen untuk memberikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini tampaknya dapat memberikan pemecahan masalah – masalah utama seputar *corporate governance* yang timbul akibat tindakan buruk yang dilakukan pihak manajemen, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham publik.

Audit intern sebenarnya berada dalam posisi untuk mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi kepentingannya dengan beban yang juga ditanggung para pemegang saham lainnya. Audit intern perusahaan seringkali merasa bahwa menerapkan *corporate governance* secara sukalera tidak memberikan keuntungan, apabila perusahaan pesaingnya tidak melakukan hal yang serupa, misalnya meningkatkan transparansi secara konsisten, termasuk memberikan informasi – informasi negatif perusahaan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan.

Konsep awal *corporate governance* menghendaki perusahaan mampu lebih akuntabel dan transparan kepada *stakeholders*. Jadi, yang diharapkan dari *corporate governance* adalah proses dari dalam perusahaan untuk secara transparan dan bertanggungjawab merealisasikan tujuan perusahaan dengan dibantu oleh audit intern (Surya, 2006: 63).

Pengertian pemeriksaan (audit) intern menurut Tugiman (2001:11) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan (audit) intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan, dengan tujuan membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, auditor intern akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan audit juga mencakup pada pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.”

Independensi ini diperlukan agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif pihak yang diperiksa. Pentingnya independensi ini karena audit intern merupakan aktivitas profesional yang memerlukan integritas dan objektivitas yang tinggi serta pribadi yang tidak mudah dipengaruhi. Tanpa

independensi, hasil audit intern yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan secara optimal (Tugiman, 2001:12).

Fungsi audit intern yang independen dapat membantu manajemen secara efektif dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan atas kejadian dalam suatu perusahaan. Fungsi audit intern juga menjamin bahwa kondisi dan kejadian yang dilaporkan adalah benar, sehingga tindakan dan pengambilan keputusan manajemen dapat dilakukan sebaik-baiknya maka diperlukan suatu laporan yang menggambarkan kegiatan yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga hasil suatu perusahaan akan tercermin dalam laporan tersebut (Tugiman, 2001:21).

Perusahaan memerlukan suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui apakah penerapan *good corporate governance* telah berjalan dengan efektif. Fungsi pemeriksaan ini dilakukan oleh suatu staf audit yang merupakan bagian dari pengendali perusahaan itu sendiri, yaitu intern audit. Fungsi intern audit ini harus independen dari pihak yang diperiksa sehingga hasil auditnya tidak dipengaruhi oleh pandangan subyektif pihak yang diperiksa. Dukungan manajemen sangat diperlukan dalam menentukan hubungan antara petugas intern audit dengan bagian-bagian lainnya untuk menghindari salah pengertian dalam kedudukan masing-masing.

Pentingnya fungsi intern audit bagi suatu perusahaan telah dikemukakan oleh *General Accounting Office (GAO)* dan dikutip oleh Cashin & James (1998:121) sebagai berikut:

1. Menemukan berbagai situasi untuk meniadakan pemborosan dan inefisiensi.

2. Menyarankan perbaikan dalam bidang kebijaksanaan, prosedur, dan struktur organisasi.
3. Menciptakan alat-alat penguji terhadap hasil pekerjaan para individu dan berbagai unit organisasi.
4. Mengawasi ketaatan pada syarat-syarat yang ditentukan oleh anggaran dasar dan undang-undang.
5. Mengecek adanya tindakan-tindakan yang tidak atau belum disetujui, yang menyimpang dan tindakan yang tidak sesuai lainnya.
6. Mengidentifikasi tempat-tempat yang mengandung kemungkinan timbulnya kesulitan dalam kegiatan di masa depan.
7. Menciptakan saluran komunikasi antara berbagai tingkat kegiatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menarik suatu hipotesa yaitu sebagai berikut: **"Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam penerapan *good corporate governance* yang efektif"**.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus yang berarti bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan yang spesifik yang meneliti masalah secara lebih mendalam (Irdiantoro, 1999:27).

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data berdasarkan sumbernya yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu (Cooper dan Emory, 1996:256):

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berwenang seperti kepala bagian persediaan, dan karyawan lainnya.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut (Cooper dan Emory, 1996:289):

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara:

- a. Wawancara

yaitu cara mengumpulkan data penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang relevan atau yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- b. Kuesioner

yaitu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan dan disampaikan kepada pihak perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Observasi

yaitu melakukan pengamatan di lapangan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan yang diteliti dan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan untuk mengetahui pelaksanaan yang sebenarnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur, buku-buku akuntansi, dan juga tulisan-tulisan yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut diperlukan untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan keadaan sebenarnya pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Hasan, 2004:5).

Setelah data terkumpul yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis ini dilakukan berdasarkan metode *Korelasi Pearson* karena koefisien ini mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi. Perhitungan korelasi ini bisa digunakan untuk mengukur koefisien korelasi pada data interval dan penggunaan asosiasi pada statistik parametrik (Singgih Santoso, 2004:315)

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. XYZ, Bandung. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan mesin. Penelitian ini diadakan pada bulan Januari 2008 sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini